



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**AKSELERASI KEBERHASILAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

**TANGGAL 13 FEBRUARI 2020
SAMPAI DENGAN
TANGGAL 15 FEBRUARI 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, JANUARI 2020**



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
AKSELERASI KEBERHASILAN PROGRAM BERENCANA
KE KOTA BOGOR PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 13 FEBRUARI S.D. 15 FEBRUARI 2020**

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional juga merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Penduduk yang besar adalah salah satu modal dasar pembangunan nasional jika penduduk menjadi basis yang integral dalam perencanaan pembangunan. Menurut UNDP, penduduk adalah kekayaan nyata suatu bangsa. Negara Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah Cina, India dan Amerika. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Namun, jumlah penduduk yang besar ini belum menjadi pendorong pembangunan nasional, sebaliknya Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di bidang kependudukan.

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 persen pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32 persen pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98 persen pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6 persen pertahun dan menurun menjadi 1,49 persen pada tahun-tahun berikutnya. Laju pertumbuhan penduduk yang selalu diatas satu persen berdampak signifikan pada laju pembangunan wilayah dan kerusakan lingkungan yang semakin sulit dikendalikan. Selain itu, permasalahan lain adalah persebaran penduduk yang tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ± 7 persen dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60 persen penduduk Indonesia.

Permasalahan kependudukan di Indonesia tidak hanya menyangkut kuantitas dan persebarannya saja, tetapi permasalahan kualitas. Kualitas penduduk dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan statistik gabungan dari harapan hidup, pendidikan, dan indeks pendapatan (ekonomi). Berdasarkan laporan UNDP yang merilis IPM tahun 2019, IPM Indonesia adalah 0.707 di tahun 2019 dan untuk pertama kalinya IPM Indonesia naik kelas menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Namun, Indonesia masih kalah jauh dengan negara tetangga Singapura dan Brunei Darussalam yang berada dikategori negara *very high human development*. Selain itu, kita masih mengalami permasalahan kesenjangan yang harus kita atasi bersama.

Kebijakan kependudukan juga diperhadapkan pada tantangan kelembagaan dan struktural dalam era otonomi daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan sejak tahun 1999, banyak program terkait kependudukan yang tidak diprioritaskan oleh daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya SKPD khusus yang menangani urusan kependudukan. Imbas dari hal ini adalah menurunnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang merupakan ujung tombak program-program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Pada periode tahun 2000, tenaga lini lapangan (PKB/PLKB) berjumlah hampir 47 ribu personil yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Saat ini jumlah tenaga PKB/PLKB yaitu sekitar 15 ribu orang dan satu

penyuluh masih memegang sekitar 6-7 desa/kelurahan. Idealnya 1 orang penyuluh membina 1-2 desa/kelurahan sehingga saat ini ada kekurangan tenaga PKB/PLK sekitar 4000 orang. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan kependudukan akan ditarik menjadi urusan Pemerintah Pusat sehingga permasalahan tenaga lini lapangan ini dapat diatasi pada masa yang akan datang.

Tantangan lain yang juga harus menjadi perhatian adalah bonus demografi yang harus menjadi alat penggerak ekonomi yang luar biasa. Bonus demografi adalah masa dimana jumlah penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut tidak banyak. Indonesia diperkirakan akan dapat menikmati bonus demografi mulai tahun ini sampai tahun 2030 dimana penduduk usia produktif akan mencapai 70 persen atau sekitar 180 juta penduduk, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja di tahun 2020-2030? Kalau pun lapangan pekerjaan tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional?

Permasalahan kependudukan harus menjadi perhatian serius penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah sehingga generasi penerus bangsa tidak akan menanggung beban dampaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan, disebutkan bahwa bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat

tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sangat jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh negara haruslah pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan kependudukan yang mengandung dua makna sekaligus yaitu, pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia.

Komisi IX DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bertugas di bidang kesehatan dan bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI, BKKBN RI, dan BPJS Kesehatan. Di bidang kependudukan, Komisi IX DPR RI selalu menekankan pada Pemerintah dalam hal ini BKKBN untuk melaksanakan pembangunan kependudukan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, mengatasi angka kesuburan total atau *Total Fertility Rate* (TFR) yang masih stagnan selama 10 tahun yaitu 2.6. Selain itu, dengan dukungan anggaran sekitar Rp 3.5 Trilyun pada tahun 2020 diharapkan ada penguatan kelembagaan BKKBN untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bogor

Kota Bogor memiliki Visi yang merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Maka visi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor adalah “Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor mempunyai misi “Mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera”.

Di lansir dari
<https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/22/bima-arya-dan-yane-ardian-tinjau-pelayanan-kb-di-puskesmas> Kota Bogor memiliki target seperti akseptor KB. Dalam lima tahun ke depan ditargetkan ada 45.000 warga yang menjadi akseptor KB. “Untuk RPJMD ditargetkan 9.000 akseptor per tahun, akan dilakukan lima tahun. Trennya memang naik terus. Bagi warga yang ingin menjadi akseptor KB, semua gratis. Tinggal bawa izin suami, KK, KTP, riwayat penyakit dan lain sebagainya. Bisa dilakukan di Puskesmas terdekat Tidak heran jika Yane Ardian dianugerahi Penghargaan "Manggala Karya Kencana" oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi tertinggi bagi Kota Bogor karena dukungan dan keterlibatan istri Walikota Bogor Bima Arya secara aktif dalam menyukseskan program-program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bogor.

Untuk itu, Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ini mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke 2 (dua) kota yaitu Kota Kota Bogor yang dinilai dapat menjadi aspirasi bagi daerah lain dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 13 januari 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif tentang struktur SKPD yang terlibat dalam program KB dan pembangunan keluarga di Kota Bogor.
2. Mendapatkan informasi dan data tentang anggaran dalam APBD Kota Bogor yang dialokasikan untuk program KB dan pembangunan keluarga.
3. Mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga di Kota Bogor dan terobosan-terobosan yang dilakukan untuk mencapai target.
4. Mendapatkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga di Kota Bogor yang dapat menjadi masukan peningkatan program KB secara nasional.

D. SASARAN

1. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam program akselerasi program keluarga berencana.
2. Diharapkan menjadi salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan Akselerasi program Keluarga Berencana untuk masyarakat
3. Diharapkan temuan-temuan permasalahan yang terjadi dapat menjadi masukan penyempurnaan dalam mengambil kebijakan di Indonesia.

E. KELUARAN (OUTPUT)

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah, khususnya BKKBN, untuk dapat mengambil terobosan dan kebijakan yang dapat mengakselerasi program KB dan pembangunan keluarga secara nasional.

F. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI akan dilakukan adalah pertemuan bersama dengan Walikota Bogor yang dihadiri oleh:

1. Kementerian Kesehatan RI
2. Perwakilan BKKBN Pusat
3. Kepala Kanwil BKKBN Jawa Barat
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor
5. Dinas Kesehatan Kota Bogor
6. Dinas Sosial Kota Bogor
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bogor
8. Perwakilan PIK-R Kota Bogor
9. Perwakilan PKB/PLKB
10. Perwakilan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kota Bogor

G. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 13 – 15 Februari 2020.

H. HASIL TEMUAN

1. Dalam menjalankan amanat Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemerintah Kota Bogor memperkuat OPD KB di Kota Bogor menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan perda No 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor no 81 tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
2. Inovasi dan terbosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah melakukan sekolah Ibu dan program ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun yang telah melahirkan wisudawan, sekolah ibu bekerjasama dengan Perguruan tinggi di Bogor yaitu Institute

Pertanian Bogor (IPB). Hal ini dilakukan guna penguatan Proyek Prioritas Nasional melalui Program Penguatan PIK-R dalam edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri dan calon ibu.

3. Dalam menjalankan program Keluarga Berencana Kota Bogor terdapat beberapa kendala di antaranya adalah Masih kurangnya sosialisasi Program BKKBN khususnya tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, belum terpenuhinya sarana dan prasarana di antaranya Balai Penyuluhan di setiap Kecamatan, Tenaga lini lapangan belum semuanya melakukan penggarapan program KB secara optimal, Pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi MKJP yang masih kurang, Partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan relatif kurang, Kurang maksimalnya pelayanan KB MOW dikarenakan tidak tersedianya *Falope Ring*,
4. Dalam mengakselerasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga upaya yyaang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor melakukan integrase dengan berbagai program pembangunan yaitu mengintegrasikan lintas sector baik instansi pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan Kampung KB yang serta bekerjasama melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
5. Dukungan pemerintah pusat mengenai permasalahan kependudukan yang dihadapi pemerintah Kota Bogor dalam berbagai hal, di antaranya regulasi terkait dengan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana yang dapat diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota, Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan MOW khususnya *Falope Ring* dan peningkatan kapasitas SDM penyuluh KB dan tenaga lini lapangan lainnya berupa pelatihan KIE.
6. Pemerintah Kota Bogor memelurkan dukungan dan komitmen instansi verikal dalam penggarapan program Bangga Kencana dan sosialisasi program secara massif dan berkala guna menunjang akselerasi program Keluarga Berencana di Kota Bogor.

7. Jumlah PIK-R Kota Bogor berdasarkan statistik rutin sebanyak 59 kelompok, strategi dalam pengembangan kelompok adalah sosialisasi Generasi Berencana (Genre) di sekolah-sekolah dan masyarakat dengan bekerjasama dengan PIK-R yang ada di Kota Bogor terutama dalam sosialisasi TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja) serta memanfaatkan momentum strategis.
8. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan terobosan dengan pemilihan duta Genre dan PI-R sebagai ajang untuk memotivasi remaja dalam meningkatkan pemahaman dan penguatan terkait dengan Generasi Berencana
9. Pembentukan kampung KB di Kota Bogor diawali dengan perencanaan Kampung KB RW 11 Kelurahan Pasirjaya Kecamatan Bogor Barat oleh Walikota Bogor pada 18 Mei 2016 sebagai tindak lanjut dari pencanangan Kampung KB oleh Presiden RI pada tanggal 16 Januari silam, dan hingga saat ini telah terbentuk 28 Kampung KB yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor, Kampung KB ditentukan dengan pertimbangan yaitu masyarakat Pra KS dan KS-nya masih tinggi, jumlah peserta KB di bawah rata-rata, dan kampung yang dianggap kampung kumuh di Kota Bogor.

I. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa berdasarkan penjabaran dan diskusi yang dilakukan, Kota Bogor bisa dijadikan sebagai contoh untuk Akselasi Program Keluarga Berencana.
2. Komisi IX DPR RI menyatakan Akselerasi Program Keluarga Berencana ini mampu mengedukasi masyarakat, karena dengan adanya Program Kampung KB yang telah di canangkan oleh Presiden RI pada Januari 2016 di Kota Cirebon.
3. Komisi IX DPR RI mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam rangka stategi yang dikembangkan sehingga remaja berpartisipasi aktif di PIK-

R dan pemilihan Duta PIK-R sebagai ajang untuk memotivasi remaja dalam meningkatkan pemahaman dan penguatan terkait dengan Generasi Berencana.

4. Komisi IX DPR RI meminta kepada BKKBN untuk melakukan terobosan kerjasama dengan Kementerian lainnya guna mempermudah akses dalam pemberdayaan masyarakat termasuk terkait dengan sosialisasi Generasi Berencana dan PIK-R di sekolah-sekolah dan masyarakat.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik tentang Akselerasi Keberhasilan Program Keluarga Berencana ke Kota Bogor Provinsi Jawa Barat ini kami susun.

Jakarta, 17 Februari 2020

TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI

KE KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

KETUA

Dra. SRI RAHAYU

A- 217

PERTANYAAN KUNSPEK SPESIFIK

KE KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

A. Pemerintah Kota BOGOR

1. Mohon disampaikan profil kependudukan Kota Bogor termasuk profil ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sampai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - a. Bagaimana Pemerintah Kota Bogor menjalankan amanat UU ini?
 - b. Bagaimana struktur SKPD yang menangani kependudukan dan keluarga berencana di Kota Bogor? Berapa anggaran SKPD tersebut pada tahun 2019 dan 2020?
3. Apa saja program unggulan terkait program KB dan pembangunan keluarga di Kota Bogor? Mohon penjelasan secara komprehensif, termasuk keberhasilan dan kendala yang dihadapi.
4. Apa saja terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mengakselerasi program KB dan pembangunan keluarga dan upaya integrasi dengan berbagai program pembangunan?
5. Apa permasalahan kependudukan yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat?
6. Apa saja masukan dari Pemerintah Kota Bogor terhadap pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga secara nasional?

B. BKKBN JAWA BARAT

1. Program-program unggulan apa saja yang dijalankan BKKBN di Kota Bogor tersebut?
2. Berapa jumlah PIK di Kota Bogor? Apa strategi yang dikembangkan sehingga para remaja berpartisipasi aktif di PIK dengan kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja?
3. Mohon dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan BKKBN Jawa Barat untuk mengakselerasi program KB di Kota Bogor dan

pembelajaran keberhasilannya di berbagai daerah lain di Indonesia.

**C. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BOGOR**

1. Kampung KB di Kota Bogor secara resmi telah dimulai pada 2016 lalu, hingga saat ini berapa jumlah Kampung KB yang ada di Kota Bogor? Bagaimana cara menentukan kampung KB tersebut? Dan apa yang menjadi pertimbangan?
2. Berapa jumlah tenaga PKB/PLKB di Kota BOGOR sampai di tingkat desa/kelurahan? Adakah insentif untuk mereka? Bagaimana penyerapan APBN BKKBN Jawa Barat tahun 2019 dibandingkan dengan pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), *Total Fertility Rate* (jumlah rata2 anak yang dilahirkan oleh wanita subur), *Unmeet need* (kebutuhan akan KB yang belum terpenuhi), *Contraceptive Prevalence Rate* (angka pemakaian kontrasepsi) dan PUP (Penundaan Usia Perkawinan) di Kota Bogor?